



LAPORAN PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL

OPTIMALISASI TARGET KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PENGENDALIAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN

**NAMA : YOPPY HERLYAN JUNIAGA
NIP. : 19760603 200604 1 009
N D H : 03**

**DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2019**

ABSTRAKSI

Perencanaan yang baik berasal dari pengendalian dan evaluasi yang baik. Namun kondisi saat ini yang terjadi di daerah terkait dengan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah lebih bersifat prosedural, formalitas, dan format-formatnya dinilai kompleks, dan belum tersusun dengan baik. Pengendalian dan evaluasi yang ada juga masih belum berorientasi pada hasil (*outcome*), dengan kata lain belum berorientasi kinerja, baru sebatas kerja, karena lebih fokus pada kegiatan dan pagu anggaran yang dinilai harus konsisten, sementara keduanya masih bersifat indikatif.

Proyek perubahan (*proper*) "Optimalisasi Target Kinerja Pembangunan Daerah melalui Pengendalian Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan" diarahkan untuk lebih menitik pada substansi perencanaan, yang intinya adalah menjaga konsistensi dan efektifitas pencapaian target kinerja pembangunan daerah. *Proper* ini menawarkan instrumen yang dapat menghasilkan informasi terkait kekonsistenan RKPD dengan RPJMD, legitimasi sebuah kegiatan, dan klaim dukungan pemerintah daerah yang lebih rasional untuk prioritas pembangunan nasional. Tujuan proyek perubahan selama laboratorium kepemimpinan, menghasilkan beberapa capaian antara lain: penyiapan instrumen/format pengendalian perumusan kebijakan RKPD, pencantuman kegiatan fasilitasi Ranpergub tentang RKPD Tahun 2020 di dalam Permendagri No. 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2020, penyusunan panduan dalam fasilitasi Rancangan Akhir RKPD, pembahasan substansi berdasarkan Instrumen/format pengendalian perumusan kebijakan RKPD, kelengkapan data program dan kegiatan provinsi tahun 2020, finalisasi surat hasil fasilitasi Ranpergub tentang RKPD Tahun 2020.

Ke depan diharapkan instrumen/format Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah dapat dibakukan dan masuk pengaturannya dalam Revisi Permendagri No. 86 Tahun 2017, lebih optimal dengan pencermatan yang lebih dalam sampai ke tahapan kegiatan, sehingga efektifitas kinerja kegiatan (*output*) dalam mencapai kinerja program (*outcome*) dapat tercapai, dan terintegrasi antardokumen perencanaan dan antarlevel pemerintahan.